

# **PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG DI GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

**Mahmuddin**

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
*mahmudin\_spd@yahoo.co.id*

**Siti Nur Zalikha**

FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
*sitinurzalikha@ar-raniry.ac.id*

**Fatmawati**

FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
*fatmawati\_1130@yahoo.com*

## **ABSTRACT**

*The village is the foremost and closest government agent and is able to directly touch the interests of the community. One of its efforts is through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), which in Aceh are called the Village-Owned Enterprises (BUMG). In its management, BUMG has several management principles, one of which is participation. Therefore, women also have the right to participate in the management of BUMG. Blang Krueng Village is one of the villages that has the best BUMG in Aceh and the 2016 National level of participation category. This study aims to look at the participation of women in the management of BUMG in Blang Krueng Village and the factors that influence women's participation in the management of BUMG in Blang Krueng Village. In this study, researchers used descriptive qualitative research. Based on the results of the study, it was found that the management of BUMG Blang Krueng Village has involved women in the planning process, delivery of aspirations, implementation and evaluation. In organizing, women are also involved as managers. It can be seen from 11 (eleven) business units that have been established, there are 5 (five) Blang Krueng BUMG business units which are chaired by women*

**Keywords:** *BUMDes, Management and Participation of Women.*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan agen pemerintah yang terdepan dan terdekat dengan masyarakat yang mampu menyentuh langsung kepentingan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang diatur dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Landasan hukum yang mengawali pendirian BUMDes ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diturunkan lagi pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di provinsi Aceh, desa merupakan pemerintahan terkecil yang disebut dengan gampong yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim<sup>1</sup>. Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Desa, di Aceh dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG, sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dan masyarakat gampong, guna menggerakkan perekonomian gampong.

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan BUMG yang istilah pengelolaan sendiri memiliki arti sama dengan manajemen. Menurut Goerge R Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya<sup>2</sup>. Dalam buku pengantar manajemen, George R Terry juga mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi dasar manajemen yaitu, *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan)<sup>3</sup>.

Dalam pengelolannya, BUMG memiliki beberapa prinsip pengelolaan diantaranya kooperatif, partisipatif, emasipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Pada penelitian ini, , peneliti hanya memfokuskan penelitian pada prinsip partisipasi khususnya perempuan dalam pengelolaan BUMDes. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mendefinisikan partisipasi sebagai “keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam

---

<sup>1</sup> . Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang *Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* pasal 1 ayat 6.

<sup>2</sup> . Melayu S.P Hasibuan, (2001). *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, h. 2

<sup>3</sup> . Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, (2018). *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, h. 10

proses penyusunan rencana pembangunan”<sup>4</sup>. Sedangkan, Uphoff mengemukakan bahwa partisipasi merupakan gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta mengevaluasinya<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMG diharapkan mampu memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan seperti perempuan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam BUMDes, peneliti menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff. Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, terdapat empat tingkat atau jenis kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu: *Participation in decision making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan), *participation in implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan), *participation in benefit* (partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan), dan *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi pembangunan)<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam sebuah rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa dari puluhan gampong di Aceh Barat yang saat ini sedang

---

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

5. Rubijanto Siswosoemarto, dkk. (2012). *Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 510

6. Dwi Sandy Aprilian, (2015). *“Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang”*, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 26-27

menggejut pendirian BUMG, ternyata BUMG yang paling aktif adalah BUMG yang diketuai oleh perempuan dan hampir seluruh pengurusnya perempuan<sup>7</sup>.

Dalam konteks lokal, Gampong Blang Krueng merupakan gampong terbaik di Aceh pada tahun 2016 serta mewakili Aceh ke tingkat Nasional dan dinobatkan sebagai BUMDes terbaik tingkat Nasional tahun 2016 untuk kategori partisipasi<sup>8</sup>. Berdasarkan atas adanya prinsip partisipasi dalam pengelolaan BUMG, diberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan hingga memberikan akses kontrol pembangunan terutama pada pengelolaan BUMG Blang Krueng sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Ini terbukti dari struktur organisasi BUMG Blang Krueng bahwa dari 19 (sembilan belas) posisi jabatan dalam struktur organisasi terdapat 5 (lima) jabatan yang diduduki oleh perempuan dan 14 (empat belas) jabatan diduduki oleh laki-laki<sup>9</sup>.

Dari struktur kepengurusan tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah gampong telah membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Mengingat bahwa pentingnya partisipasi perempuan dalam BUMG yang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan gampong. Di samping memiliki peran ganda, perempuan juga masih bisa menyempatkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan dan program BUMG. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji tentang partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penulis berusaha untuk menggali informasi seluas-luasnya dan

---

7. Aryadji, *Kaum Perempuan harus Terlibat dalam Pembangunan Desa*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari situs: <http://www.berdesa.com/kaum-perempuan-harus-terlibat-pembangunan-desa/>.

8. Syahril Ahmad, (2016). *Tim Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar*

9. Siti Nur Zalikha, *Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa*, *Jurnal Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Science*, Vol 4 No. 1 2018

sedalam-dalamnya mengenai partisipasi perempuan dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Blang Krueng. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan beberapa perangkat Gampong, pengurus BUMG Blang Krueng dan masyarakat Gampong Blang Krueng. kedua teknik pengumpulan data tersebut termasuk dalam sumber data primer. Sedangkan, dokumentasi termasuk dalam sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen gampong seperti RPJM Gampong, Profil Gampong dan dokumen lainnya. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan reduksi data melalui 3 (tiga) prosedur analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

BUMG di Gampong Blang Krueng berdiri sejak tanggal 3 bulan Mei tahun 2009 atas dasar inisiatif dari kader-kader gampong, pemerintah gampong, masyarakat, dan LSM serta didukung dengan adanya regulasi berupa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Bupati Aceh Besar No. 14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Berdasarkan ART Gampong Blang Krueng, bidang usaha yang dijalankan BUMG Blang Krueng meliputi jasa pelayanan perindustrian perdagangan, pertanian, peternakan, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi di luar kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah<sup>10</sup>. Saat ini, Gampong Blang Krueng sudah memiliki 11 (sebelas) Unit Usaha BUMG, diantaranya: 1) Unit Usaha Rumah Sewa, 2) Unit Usaha Sewa Pelaminan dan Teratak, 3) Unit Usaha Kelola Harta Baitul Mal, 4) Unit Usaha Simpan Pinjam, 5) Unit Usaha Bank Sampah, 6) Unit Usaha Penggemukan Sapi, 7) Unit Usaha Pengembangan Pendidikan, 8) Unit Usaha Hand Traktor, 9) Unit Usaha Toko

---

<sup>10</sup> . Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013.

Gampong dan Depot Air Minum, 10) Unit Usaha Pengelolaan Gas, dan 11) Unit Usaha Kue Keukarah.

Dari 11 (sebelas) unit usaha yang dikembangkan terdapat 5 (lima) unit usaha diketuai oleh perempuan yaitu unit usaha sewa pelaminan dan teratak, unit usaha simpan pinjam, unit usaha bank sampah, unit usaha pengembangan pendidikan, dan unit usaha kue keukarah. Partisipasi perempuan merupakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, pengelolaan serta kegiatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selain perempuan memiliki peran domestik, pemerintah juga telah membuka ruang bagi perempuan untuk dapat terlibat di ranah publik seperti dalam pembangunan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak.<sup>11</sup> Hal yang sama juga dijelaskan dalam GBHN bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini mendeskripsikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan.<sup>12</sup>

Gampong Blang Krueng sendiri juga memiliki regulasi bahwa perempuan selalu dilibatkan dalam kegiatan seperti musyawarah gampong yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Keuchik, Ketua dan anggota Tuha Peut, para Kepala Dusun, 5 (lima) orang Permusyawaratan Pemuda, 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan serta 5 (lima) orang Tokoh Masyarakat.<sup>13</sup>

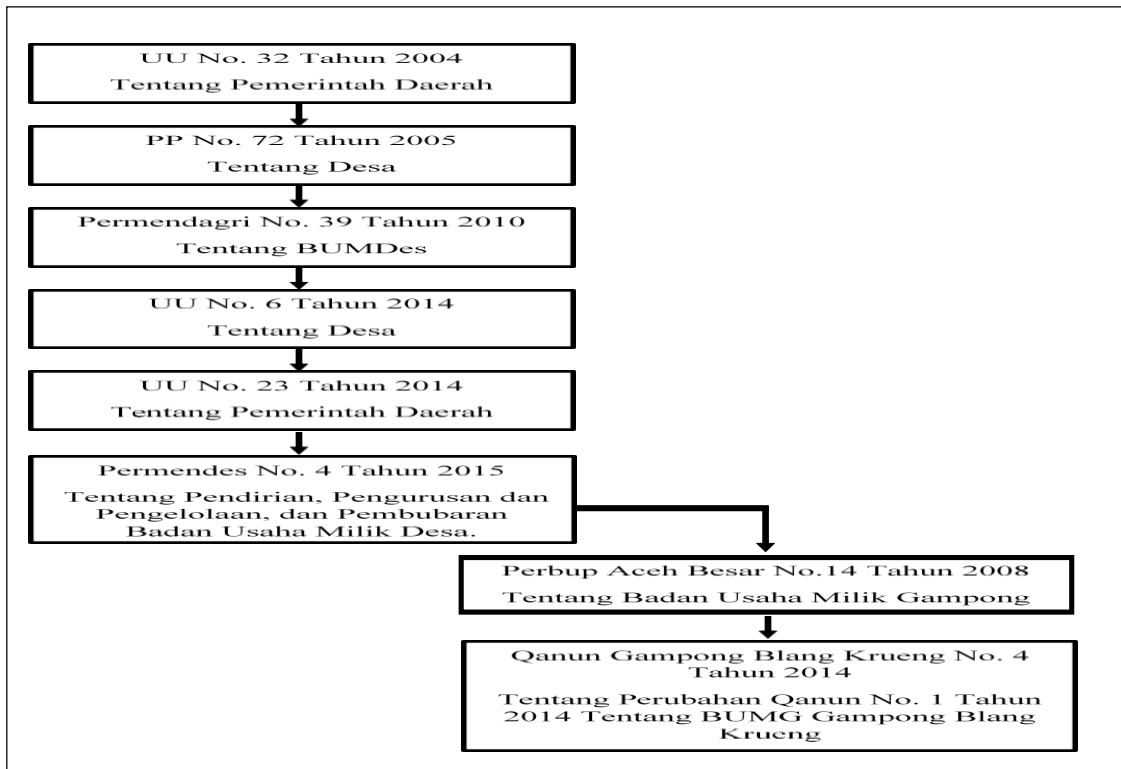
---

<sup>11</sup>. Triana Sofian, Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, *Muwazah*, Vol.1, No.1, Januari-Juli 2009, h. 63.

<sup>12</sup>. Hunia Djumati, Wilson Y. Rompas, dan A.J. Rorong, (2018). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten halmahera Utara.

<sup>13</sup>. Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013, Pasal 13.

### Alur Regulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong



Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry bahwa terdapat empat fungsi manajemen/pengelolaan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dari keempat fungsi tersebut, peneliti telah menemukan dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng, sebagai berikut:

a. Perencanaan

BUMG Blang Krueng berdiri atas dasar adanya perencanaan dari pihak aparat gampong yang didukung dengan adanya sumber daya masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan Gampong Blang Krueng ikut terlibat dalam perencanaan pengelolaan BUMG, salah satunya dapat kita lihat dari unit usaha yang dikembangkan seperti unit usaha kue keukarah, yang pengelolaannya diketuai oleh perempuan yaitu ibu Azizah Nazar dengan anggotanya sebanyak 25 orang perempuan begitu pula dengan unit usaha simpan pinjam dan unit usaha lainnya. Berdirinya unit-unit usaha BUMG Blang Krueng bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Blang Krueng sehingga dalam proses perencanaan, telah menetapkan tujuan dan prosedur masing-masing unit usaha.

#### b. Pengorganisasian

BUMG Blang Krueng adalah organisasi atau lembaga yang berdiri sejak tahun 2009 di bawah koordinasi pemerintah Gampong Blang Krueng dengan jumlah unit usaha hingga saat ini sebanyak 11 unit usaha.<sup>14</sup> Dalam menjalankan program dari setiap unit usaha BUMG, Gampong Blang Krueng telah menetapkan ketua dan anggota yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam pengelola unit usaha. Pengelola harus mampu mengarahkan dan memimpin setiap unit usaha yang dipimpin. Penetapan ketua dan anggota unit usaha ditunjuk dan diberhentikan oleh masyarakat dalam forum musyawarah Gampong Blang Krueng dan penetapannya juga tidak terlepas dari persetujuan individu yang ditunjuk serta mereka dianggap orang-orang yang telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin masing-masing unit usaha. Penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Krueng atas persetujuan Tuha Peut.

#### c. Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap BUMG Blang Krueng, pengawas harus berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Secara struktural pengawasan BUMG Blang Krueng dilakukan oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut, dan Imum Meunasah.<sup>15</sup> Pengawas mengikuti setiap waktu kegiatan dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng.

### D. KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng sudah berjalan dengan baik. Perempuan ikut berpartisipasi dalam perencanaan seperti adanya partisipasi perempuan untuk mengikuti musyawarah ditandai dengan adanya kehadiran perempuan yang setara dengan laki-laki dan memiliki tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada pengorganisasian kegiatan BUMG,

---

<sup>14</sup> . Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.

<sup>15</sup> . Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.



perempuan juga ikut terlibat sebagai pengelola terlihat dari 11 (sebelas) unit usaha yang berdiri, 5 (lima) unit usaha BUMG Blang Krueng diketuai oleh perempuan. Pada pelaksanaannya, perempuan ikut terlibat dalam pembuatan kue keukarah, membersihkan gampong, pemberian sumbangan dana.

Terlibatnya perempuan dalam pengelolaan BUMG memberi manfaat dalam membantu perekonomian rumah tangga, kemudahan modal usaha, pemberdayaan perempuan, dan mendorong perempuan lebih mandiri. Dalam pengawasan partisipasi perempuan masih cukup rendah karena secara struktur pengawasan dilakukan oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut dan Imum Meunasah. Sedangkan, pada evaluasi kegiatan BUMG, tidak semua perempuan ikut terlibat, hanya saja yang terlibat merupakan perangkat gampong serta beberapa pengurus BUMG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, Dwi Sandy. 2015. "Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang" (skripsi yang dipublikasi). Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses tanggal 22 Oktober 2017.
- Aryadji. *Kaum Perempuan harus Terlibat dalam Pembangunan Desa*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari situs: <http://www.berdesa.com/kaum-perempuan-harus-terlibat-pembangunan-desa/>.
- Damanhuri, D. (2016). Reconstruction of Matan Hadith Understanding About Women Position in Household. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 239-256. doi:10.26811/peuradeun.v4i2.101
- Djumati, Hunia. Wilson Y. Rompas, dan A.J. Rorong, Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten halmahera Utara. Diakses tanggal 17 April 2018
- Firmansyah, Anang dan Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen*
- Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332

- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Peraturan Bupati Aceh Besar No.14 Tahun 2008 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong*.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 353-362.
- Siswosoemarto, Rubijanto, Victor Hasibuan, dan Dadang Iskandar. 2012. *Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sofian, Triana. Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, *Muwazah*, Vol.1, No.1, Januari-Juli 2009. Diakses tanggal 11 April 2018
- Syahril Ahmad, *Tim Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar (1 November 2016)*.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Tabrani ZA. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Deepublish.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zalikha, Siti Nur. Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa, *Al-Ijtima`i International Journal of Government and Social Science*.